

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan Tahunan TA 2013 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

a) LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2013 (*Netto*) adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp7.840.288.730.159 atau mencapai 119,30% dari estimasi pendapatan sebesar Rp6.571.783.586.228.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2013 (*Netto*) sebesar Rp35.360.482.272.617 atau mencapai 91,52% dari alokasi anggaran sebesar Rp38.636.738.592.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012 disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dan 2012

Urian	TA 2013			TA 2012
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	6.571.783.586.228	7.840.288.730.159	119,30	6.691.782.310.569
Belanja Negara	38.636.738.592.000	35.360.482.272.617	91,52	30.575.626.351.480

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2013 dan 2012

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2013 dicatat dan disajikan sebesar Rp42.096.444.185.276 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp4.558.753.682.633, Aset Tetap (*Netto*) sebesar Rp35.602.945.141.650, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya sebesar (*Netto*) setelah akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp504.974.320 dan Rp1.934.240.386.673.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp4.563.843.203.608 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp37.532.600.981.668 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar (Rp5.089.520.975) dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp37.537.690.502.643.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012

Uraian	Tanggal Neraca		Bertambah (Berkurang)	
	31 Des 2013	31 Des 2012	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	4.558.753.682.633	3.675.217.641.691	883.536.040.942	24,04
Aset Tetap	35.602.945.141.650	42.678.312.749.125	(7.075.367.607.475)	(16,58)
Piutang Jangka Panjang	504.974.320	500.151.510	4.822.810	0,96
Aset Lainnya	1.934.240.386.673	11.408.023.880.625	(9.473.783.493.952)	(83,04)
Jumlah Aset	42.096.444.185.276	57.762.054.422.951	(15.665.610.237.675)	(27,12)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	4.563.843.203.608	1.070.607.652.107	3.493.235.551.501	326,29
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	(5.089.520.975)	2.604.609.989.584	(2.609.699.510.558)	(100,20)
Ekuitas Dana Investasi	37.537.690.502.643	54.086.836.781.260	(16.549.146.278.617)	(30,60)
Jumlah Ekuitas Dana	37.532.600.981.668	56.691.446.770.844	(19.158.845.789.176)	(33,79)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	42.096.444.185.276	57.762.054.422.951	(15.665.610.237.675)	(27,12)

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2013, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

3.1. Informasi penting Pelaksanaan anggaran

- 1) Anggaran Belanja Kemenkes TA 2013 sesuai surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Nomor : KU.01.01/1/0250/2014 tanggal 25 Januari 2014 sebesar Rp38.618.818.451.000 dan data SAI sebesar Rp38.636.738.592.000, atau terdapat perbedaan data SAI lebih besar sebesar Rp17.920.141.000 disebabkan antara lain :
 - a) Terdapat 3 Satker yang telah dialokasikan anggaran dan telah terbit DIPA, namun sesuai surat Ditjen Anggaran Nomor S-3114/AG/2013 tanggal 3 Desember 2013 DIPA tersebut dibatalkan, yaitu :
 - (1) Satker 051955 RSUD Nganjuk, alokasi Rp8.000.000.000
 - (2) Satker 052760 Dinkes Kab Bojonegoro, alokasi Rp500.000.000
 - (3) Satker 030533 Dinkes Kab Pekalongan, alokasi Rp500.000.000.
 - b) Terdapat 16 Satker besarnya alokasi anggaran berbeda, disebabkan data Biro Perencanaan dan Anggaran belum menyesuaikan dengan DIPA Revisi terakhir, yaitu :

NO	ES	SATKER	KW	NAMA SATKER	PAGU		
					ROREN	SAI	SELISIH
1	03	259355	TP	DINKES KAB. MAMBERAMO RAYA	3.902.200.000	1.951.100.000	1.951.100.000
2	05	415743	KD	KKP LHOKSEUMAWE	4.657.650.000	5.142.535.000	-484.885.000
3	01	330150	DK	DINKES PROV. PAPUA BARAT	4.842.922.000	5.919.340.000	-1.076.418.000
4	03	029479	TP	DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG		6.208.950.000	-6.208.950.000
5	04	259003	DK	DINKES PROP PAPUA	19.418.585.000	10.156.745.000	9.261.840.000
6	03	029015	DK	DINAS KESEHATAN PROP. JAWA BARAT	15.036.261.000	13.036.261.000	2.000.000.000
7	12	632153	KD	POLTEKKES BENGKULU	29.773.386.000	30.262.835.000	-489.449.000
8	05	416114	KD	KKP JAKARTA	30.282.557.000	32.405.272.000	-2.122.715.000
9	03	466379	KP	BINA KESEHATAN IBU DAN REPRODUKSI	33.153.725.000	33.287.856.000	-134.131.000
10	12	632217	KD	POLTEKKES JAKARTA III	71.879.142.000	73.311.485.000	-1.432.343.000
11	01	258530	KP	PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEHATAN	78.234.891.000	78.309.286.000	-74.395.000
12	11	416202	KD	PUSAT HUMANIORA SURABAYA-JATIM	88.082.701.000	88.160.701.000	-78.000.000
13	04	257847	KD	RS STROKE NASIONAL BUKITTINGGI	113.049.902.000	116.273.192.000	-3.223.290.000
14	04	548890	KD	RS KANKER DHARMAIS JAKARTA	429.878.896.000	438.157.677.000	-8.278.781.000
15	04	415582	KD	RS DR SARDJITO YOGYAKARTA	657.088.676.000	658.603.985.000	-1.515.309.000
16	04	415423	KD	RS DR CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA	1.343.164.597.000	1.358.179.012.000	-15.014.415.000
TOTAL					2.922.446.091.000	2.949.366.232.000	-26.920.141.000

- 2) Jumlah Satker Kemenkes TA 2013 sesuai DIPA yang terbit sebanyak 1.607 Satker dengan pagu anggaran sebesar Rp38.636.738.592.000. Selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kemenkes TA. 2013. Jumlah DIPA sebanyak 1.607 Satker, dengan rincian sesuai Jenis Kewenangan dan hubungan kerja dengan KPPN, yaitu : Kantor Pusat (KP) sebanyak 46 Satker, Kantor Daerah (KD) sebanyak 166 Satker, Dekonsentrasi (DK) sebanyak 198 Satker, Tugas Pembantuan (TP) sebanyak 1.197 Satker.

- 3) Dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah, telah dilakukan proses registrasi, persetujuan rekening, dan usulan dana hibah untuk masuk DIPA dan telah diterbitkan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) atas realisasi belanja hibah.

3.2. Informasi penting terkait Penyusunan Laporan Keuangan TA 2013

- 1) Penyusunan Laporan Keuangan Satker Kantor Daerah (UPT) dan Dekonsentrasi seluruhnya telah dilakukan pelaporan secara berjenjang melalui Unit Akuntansi Wilayah (UAW) dari :
 - Satuan Kerja → Wilayah → Eselon I → Kementerian Kesehatan.
 - Satker Kantor Pusat → Eselon I → Kementerian Kesehatan.
 - Satker Tugas Pembantuan → Eselon I → Kementerian Kesehatan.
- 2) Unit Akuntansi Wilayah Vertikal dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 225/MENKES/SK/VI/2013 tentang Pembentukan UAPPA/B-W Vertikal Kemenkes, sedangkan Unit Akuntansi Wilayah Dekonsentrasi dibentuk oleh masing-masing Kepala Daerah (Gubernur) atau Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- 3) Unit Akuntansi tingkat Eselon I, pembentukannya menjadi tanggungjawab yang melekat bagi Pejabat Eselon I terkait untuk setiap tahun anggaran menetapkan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang (UAPPA/B-E1) Eselon I dengan Keputusan Direktur Jenderal/Kepala Badan didasarkan pada Permenkes Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
- 4) Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, dalam proses penyusunan laporan keuangan tahun 2013 telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal yang mencakup seluruh jenjang pelaporan.
- 5) Dalam proses pemutakhiran dan penatausahaan barang milik negara di tingkat Satuan Kerja, telah dilakukan rekonsiliasi data BMN dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tatacara dan prosedur mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/2009 tentang Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

3.3. Beberapa Surat dan Edaran oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Kemenkes TA 2013.

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa aset tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
- 3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KMK.06/2013 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- 4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- 6) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-33/PB/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Penggunaan Akun PNBPN pada BLU.
- 7) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-07523/PB/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Langkah-langkah menghadapi akhir TA 2013.
- 8) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-9284/PB/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Kebijakan Akuntansi atas Transaksi pada Akhir Tahun Anggaran dalam rangka Penyusunan LKKL Tahun 2013.
- 9) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : S-229/PB/2014 tanggal 10 Januari 2014 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga TA 2013.
- 10) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI Nomor S-880/PB/2014 tanggal 11 Februari 2014 perihal Perpanjangan Batas Waktu Pengesahan Revisi DIPA TA 2013 dan Pengajuan SPM Pengesahan.
- 11) Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Nomor S-556/PB.3/2014 tanggal 28 Januari 2014 perihal penyelesaian WA/SKP LC yang belum diterbitkan SP3.
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tanggal 14 maret 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN
- 13) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI Nomor S-2103/PB/2014 tanggal 28 Maret 2014 perihal Perpanjangan Batas Waktu Revisi DIPA dan Pengesahan/Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013.
- 14) Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI Nomor S-2186/PB/2014 tanggal 3 April 2014 perihal Perpanjangan Batas Waktu Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU dan Penyampaian LKPP Tingkat Kuasa BUN KPPN dan LKPP Tingkat Kuasa BUN Kanwil Tahun 2013.
- 15) Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI Nomor S-2642/PB/2014 tanggal 23 April 2014 perihal Dispensasi Batas Akhir Pengesahan Pendapatan/Belanja BLU Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013

3.4. Beberapa Edaran, Surat, Peraturan dan Kebijakan telah diterbitkan oleh Kemenkes untuk mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Kemenkes TA 2013.

- 1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 003/Menkes/SK/I/2013 tentang Pedoman Pengelolaan PNBPN Kementerian Kesehatan.

- 2) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 225/MENKES/SK/VI/2013 tentang Pembentukan UAPPA/B-W Vertikal Kemenkes.
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 470/Menkes/SK/XI/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga melalui mekanisme APBN di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 476/MENKES/SK/XII/2013 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan.
- 5) Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.03.03/III/2385/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker (BLU dan Non BLU) dan Tingkat Wilayah (Vertikal dan Dekonsentrasi) di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 6) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenkes Nomor HK.02.04/4/1371/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap pada Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan TA 2013.
- 7) Surat Sekretaris Jenderal Kemenkes nomor KU.02.02/2/902/2014 tanggal 14 April 2014 hal Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Revisi DIPA, Pengesahan Pendapatan/ Belanja BLU, Penerbitan SPHL dan MPHL-BJS kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.

3.5. Kejadian Penting setelah tanggal 31 Desember 2013, antara lain :

- 1) Telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara atas saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2013, sebesar Rp3.186.710.112 atau 94,96% dari jumlah yang harus disetor sebesar Rp3.026.224.121.
- 2) Telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara atas saldo kas di Bendahara Penerimaan yang tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2013, sebesar Rp2.356.175.466 atau 16,97% dari jumlah yang harus disetor Rp399.866.419.
- 3) Telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara atas saldo Kas Lainnya dan Setara kas tersaji dalam Neraca per 31 Desember 2013, sebesar Rp834.856.880.212.
- 4) Sebagai tindaklanjut pertemuan tiga pihak antara Kemenkeu, Kemenkes dan BPK yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2014 sudah dilakukan reviu penyajian nilai utang klaim Jamkesmas yang terdapat di satker vertikal Kemenkes sebesar Rp457.139.680.675, sebesar Rp2.763.089.827.005 di Pelayanan Rujukan dan sebesar Rp232.959.552.140 di Pelayanan Dasar. Atas utang tersebut sudah dilaporkan pada Laporan Keuangan Kemenkes yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Pusat, BPKP dan Tim Independen. Verifikasi dilakukan untuk menyajikan dan meyakini nilai utang sesuai data dukung yang memadai sesuai pernyataan dari PPK (1.274 PPK) atas nilai utang klaim Jamkesmas.

- 5) Telah dilakukan Rekonsiliasi atas Laporan Realisasi Anggaran TA 2013 dengan DAPK Kementerian Keuangan, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.

Rekonsiliasi SAU >< SAI TA 2013

No	Uraian	SAU (Rp)	SAI (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Pagu Belanja	38.639.566.977.000	38.636.738.592.000	2.828.385.000
2	LRA Belanja	35.415.541.454.983	35.415.566.644.983	-25.190.000
3	LRA Pengembalian Belanja	55.129.244.847	55.084.372.366	44.872.481
4	Estimasi Pendapatan	6.571.530.416.228	6.571.783.586.228	-253.170.000
5	LRA Pendapatan	7.841.631.963.690	7.840.295.670.625	1.336.293.065
6	LRA Pengembalian	6.970.068	6.931.466	38.602

Keterangan:

- a. Pagu Belanja menunjukkan perbedaan antara data SAU dan data SAI sebesar Rp2.828.385.000. Perbedaan ini disebabkan SAU belum melakukan revisi DIPA;
- b. LRA Belanja menunjukkan perbedaan antara data SAU dan data SAI sebesar Rp25.190.000. Perbedaan ini disebabkan SAU belum membukukan transaksi terkait.
- c. LRA Pengembalian Belanja menunjukkan perbedaan antara data SAU dan data SAI sebesar Rp44.872.481. Perbedaan ini disebabkan :
 - a) SAU mencatat sebagai pengembalian belanja sedangkan SAI mencatat sebagai pendapatan, transaksi sebesar Rp7.920.000
 - b) SAU belum membukukan transaksi sebesar Rp729.232.600
 - c) Satker tidak teridentifikasi, transaksi sebesar Rp129.838.600
 - d) Bukan Satker Kemenkes, transaksi sebesar Rp2.486.400
 - e) SAI belum membukukan transaksi sebesar Rp633.860.081
- d. Estimasi Pendapatan menunjukkan perbedaan antara data SAU dan data SAI sebesar Rp253.170.000. Perbedaan ini disebabkan SAU belum melakukan revisi DIPA.
- e. LRA Pendapatan menunjukkan terdapat perbedaan antara data SAU dan data SAI sebesar Rp1.336.293.065 perbedaan ini disebabkan :
 - a) SAU belum membukukan transaksi sebesar Rp16.610.934.003
 - b) Satker tidak teridentifikasi, transaksi sebesar Rp14.009.567.801
 - c) SAU mencatat sebagai pengembalian belanja sedangkan SAI mencatat sebagai pendapatan, transaksi sebesar Rp7.920.000
 - d) Bukan Satker Kemenkes, transaksi sebesar Rp3.945.579.267
- f. LRA Pengembalian Pendapatan menunjukkan perbedaan antara data SAU dan data SAI sebesar Rp38.602. Perbedaan ini disebabkan karena kesalahan Bank persepsi.

- 6) Telah dilakukan Rekonsiliasi Internal atas data BMN pada SAK dan SIMAK-BMN, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.

Rekonsiliasi BMN SAK dan SIMAK BMN TA 2013

KODE AKUN	URAIAN AKUN	SAK	SIMAK	SELISIH
117	PERSEDIAAN	1.352.133.180.621	1.604.646.073.717	(252.512.893.096)
		1.352.133.180.621	1.604.646.073.717	(252.512.893.096)
131	TANAH	13.533.122.988.894	13.533.122.978.894	10.000
132	PERALATAN DAN MESIN	21.129.401.062.570	21.115.237.673.321	14.163.389.249
133	GEDUNG DAN BANGUNAN	9.841.071.606.411	9.841.917.964.711	(846.358.300)
134	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	478.733.770.865	475.359.904.865	3.373.866.000
135	ASET TETAP LAINNYA	210.089.724.053	211.671.380.807	(1.581.656.754)
136	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	2.722.301.138.639	2.718.096.781.639	4.204.357.000
	TOTAL ASET TETAP BRUTO	47.914.720.291.432	47.895.406.684.237	19.313.607.195
137	AKUMULASI PENYUSUTAN	(12.311.775.149.782)	(12.298.976.718.553)	(12.798.431.229)
	TOTAL ASET TETAP NETTO	35.602.945.141.650	35.596.429.965.684	6.515.175.966
162	ASET TIDAK BERWUJUD	122.293.488.592	122.612.904.093	(319.415.501)
166	ASET LAIN-LAIN	2.592.793.570.765	11.392.176.050.934	(8.799.382.480.169)
	TOTAL ASET LAIN-LAIN BRUTO	2.715.087.059.357	11.514.788.955.027	(8.799.701.895.670)
169	AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1.472.033.604.686)	(7.849.431.232.303)	6.377.397.627.617
	TOTAL ASET LAIN-LAIN NETTO	1.243.053.454.671	3.665.357.722.724	(2.422.304.268.053)
	TOTAL ASET BRUTO	51.981.940.531.410	61.014.841.712.981	(9.032.901.181.571)
	TOTAL AKUMULASI PENYUSUTAN	(13.783.808.754.468)	(20.148.407.950.856)	6.364.599.196.388
	TOTAL ASET NETTO	38.198.131.776.942	40.866.433.762.125	(2.668.301.985.183)

Berdasarkan data tersebut diatas secara total terdapat perbedaan total aset SAK lebih rendah dari SIMAK-BMN sebesar (Rp2.668.301.985.183) dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Persediaan, data SAK sebesar Rp1.352.133.180.621 dan SIMAK sebesar Rp1.604.646.073.717 atau terdapat perbedaan SAK lebih rendah sebesar (Rp252.512.893.096), perbedaan ini disebabkan barang persediaan dan atau BMN yang diserahkan ke Pemerintah Daerah dikeluarkan dari aplikasi SAK dan tetap disajikan di SIMAK-BMN, terjadi pada :
- Ditjen Bina Upaya Kesehatan, data SAK sebesar Rp515.054.205.964 dan SIMAK sebesar Rp654.295.552.956 atau terdapat perbedaan SAK lebih rendah sebesar (Rp139.241.346.992)
 - Ditjen PP dan PL, data SAK sebesar Rp592.854.140.834 dan SIMAK sebesar Rp703.453.800.908 atau terdapat perbedaan SAK lebih rendah sebesar (Rp110.599.660.074)
 - Badan Litbangkes, data SAK sebesar Rp8.833.450.377 dan SIMAK sebesar Rp11.505.336.407 atau terdapat perbedaan SAK lebih rendah sebesar (Rp2.671.886.030)
- b) Aset Tetap, sebelum penyusutan data SAK sebesar Rp47.914.720.291.432 dan SIMAK sebesar Rp47.895.406.684.237 atau terdapat perbedaan SAK lebih besar sebesar Rp19.313.607.195, perbedaan ini terjadi pada :
- Ditjen Bina Upaya Kesehatan, data SAK sebesar Rp34.282.326.993.221 dan SIMAK sebesar Rp34.270.059.346.226 atau terdapat perbedaan SAK lebih besar sebesar Rp12.267.646.995.
 - Ditjen PP dan PL, data SAK sebesar Rp2.700.084.813.681 dan SIMAK sebesar Rp2.693.038.853.481 atau terdapat perbedaan SAK lebih besar sebesar Rp7.045.960.200.

Perbedaan nilai antara data SAK dan SIMAK-BMN untuk masing-masing akun Aset Tetap dijelaskan pada point C.2. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca, untuk kelompok Aset Tetap.

Atas perbedaan tersebut akan ditindaklanjuti pada TA 2014 dan hasilnya akan disajikan pada Laporan Keuangan Semester I TA 2014

- c) Aset Lainnya, sebelum penyusutan data SAK sebesar Rp2.715.087.059.357 dan SIMAK sebesar Rp11.514.788.955.027 atau terdapat perbedaan SAK lebih rendah sebesar Rp(8.799.701.895.670), perbedaan ini secara signifikan antara lain disebabkan aset/BMN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan hasil pengadaan sampai dengan TA 2011 senilai Rp8.805.017.032.187 dikeluarkan dari Aplikasi SAK dan tetap disajikan dalam SIMAK-BMN.
Penjelasan secara rinci atas perbedaan nilai SAK dan SIMAK-BMN pada kelompok akun Aset Lainnya disajikan pada point C.4. Penjelasan atas Pos-pos Neraca, untuk kelompok akun Aset Lainnya.
- d) Akumulasi Penyusutan, data SAK sebesar (Rp13.783.808.754.468) dan SIMAK sebesar (Rp20.148.407.950.856) atau terdapat perbedaan SIMAK lebih besar sebesar Rp6.364.599.196.388, perbedaan ini terjadi pada :
- Sekretariat Jenderal, data SAK sebesar (Rp880.208.646.454) dan SIMAK sebesar (Rp1.389.021.747.341) atau terdapat perbedaan SAK lebih rendah sebesar Rp508.813.100.887.
 - Ditjen Bina Upaya Kesehatan, data SAK sebesar (Rp9.584.575.398.215) dan SIMAK sebesar (Rp14.672.819.970.696) atau terdapat perbedaan SAK lebih rendah sebesar Rp5.088.244.572.481.
 - Ditjen PP dan PL, data SAK sebesar (Rp824.390.497.723) dan SIMAK sebesar (Rp916.482.984.191) atau terdapat perbedaan SAK lebih rendah sebesar Rp92.092.486.468.
 - Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, data SAK sebesar (Rp14.480.648.987) dan SIMAK sebesar (Rp30.495.621.241) atau terdapat perbedaan SAK lebih rendah sebesar Rp16.014.972.254.
 - Badan PPSDM Kesehatan, data SAK sebesar (Rp1.884.451.143.347) dan SIMAK sebesar (Rp1.901.590.146.625) atau terdapat perbedaan SAK lebih rendah sebesar Rp17.139.003.278.
- 7) Hasil Rekonsiliasi Data Keuangan Tiga Pihak (Kemenkes, Kemenkeu dan BPK RI)
- a) Aset yang pengadaan dari pusat yang sudah diserahkan ke Pemda
- (1) Aset-aset tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Kementerian Kesehatan, namun masih tersaji dalam Neraca Kementerian Kesehatan Tahun 2013.
 - (2) Aset-aset tersebut tersaji di Neraca pada akun Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya.
 - (3) Untuk Aset dimaksud yang sudah diserahkan ke Pemda yang tersaji dalam persediaan, BPK menyarankan agar dikeluarkan dari Persediaan pada Neraca Tahun 2013 (aplikasi SAKPA), namun masih tetap disajikan dalam Laporan Persediaan (Aplikasi Persediaan) maupun Laporan Posisi BMN di Neraca (Aplikasi SIMAK-BMN). Terhadap selisih angka yang tersaji pada Neraca Tahun 2013 dengan angka yang tersaji dalam Laporan Persediaan dan Laporan Posisi BMN di Neraca tersebut agar dibuat penjelasan yang memadai atau diungkapkan dalam CaLBMN dan CaLK.

(4) Untuk Aset dimaksud yang sudah diserahkan ke Pemda yang tersaji dalam Aset Tetap direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya. Sedangkan yang tersaji dalam Aset Lainnya tetap disajikan pada Aset Lainnya dan tidak dikeluarkan dari Neraca Tahun 2013. Hal ini dilakukan karena adanya kesulitan dalam memperkirakan nilai penyusutannya.

b) Penatausahaan Piutang

(1) Terdapat beberapa Satker/Rumah Sakit terlalu cepat menentukan kualitas piutangnya menjadi piutang macet. Sehingga baru 3 bulan usia piutang, penyisihan piutangnya sudah 100%. Sehingga BPK sulit mengakui kewajaran nilai piutang dan penyisihannya.

(2) BPK menyarankan agar dibuatkan panduan/pedoman khusus penatausahaan piutang Rumah Sakit.

(3) Terhadap Satker yang belum melakukan penatausahaan piutang dengan baik, diupayakan pada Laporan Keuangan Semester I TA 2014 untuk segera melakukan perbaikan penatausahaan piutang.

8) Realisasi Belanja Modal Tahun 2013.

Realisasi Belanja Modal (*Netto*) sebesar Rp7.371.607.598.107 sedangkan mutasi BMN bersumber dari transaksi kas SP2D sebesar Rp7.290.849.541.363 atau terjadi peningkatan nilai BMN lebih rendah dari realisasi belanja modal. Hal ini tercermin dalam transaksi BMN sebagai berikut

- 101 Pembelian sebesar Rp4.024.421.688.105.
- 202 Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp118.742.920.643.
- 113 Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp15.097.783.426.
- 502 Perolehan/Penambahan KDP sebesar Rp504.383.457.483.
- 503 Pengembangan KDP sebesar Rp2.628.203.691.706.

3.6. Informasi Penting Hasil Audit Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kementerian Kesehatan TA 2013 telah diaudit oleh BPK RI. Atas seluruh koreksi audit telah ditindaklanjuti dan dilakukan penyesuaian terhadap Laporan Barang Milik Negara maupun Laporan Keuangan (LRA, Neraca dan CaLK) melalui aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi SAK audit berdasarkan temuan dari Tim Pemeriksa.

Langkah-langkah koreksi :

Pada prinsipnya temuan hasil pemeriksaan dari Tim Pemeriksa setelah dilakukan penelusuran/konfirmasi/klarifikasi kepada Satker terkait sudah dilakukan koreksi/penyesuaian pada tingkat satker yang disampaikan secara berjenjang sampai dengan tingkat Kementerian Kesehatan TA 2013.

Beberapa hal yang diperbaiki (koreksi/penyesuaian) mencakup :

- 1) Target dan Realisasi Pendapatan PNBP yang belum masuk laporan.
- 2) Pagu dan Realisasi Belanja yang belum masuk laporan dan menambah pengeluaran, termasuk adanya dokumen SPHL yang baru terbit atas penggunaan dana hibah langsung.
- 3) Pendapatan dan Belanja Satker BLU yang baru mendapatkan pengesahan dari KPPN.

- 4) Koreksi penambahan/pengurangan nilai pada akun neraca sesuai data/dokumen sumber hasil penelusuran Tim BPK RI.
- 5) Koreksi penambahan/pengurangan nilai Barang Persediaan yang belum masuk/salah masuk pada Laporan Keuangan.
- 6) Entry data BMN berupa barang Persediaan dan Aset Tetap hasil pengadaan TA 2013 yang belum masuk pada Laporan.
- 7) Koreksi internal yang dilakukan oleh masing-masing Unit Eselon I.
- 8) Penyesuaian penyajian data persediaan atas barang yang diserahkan ke Pemda dikeluarkan dari SAK.
- 9) Melakukan reklasifikasi Aset Tetap (BMN) ke dalam Aset Lain-lain.
- 10) Penyesuaian penyajian saldo dana Jamkesmas TA 2013 dan pencatatan utang Jamkesmas sesuai perkembangan dan hasil penelusuran terhadap klaim Jamkesmas yang belum dibayar.
- 11) Penyesuaian Aset/BMN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah dikeluarkan dari aplikasi SAK.

Tabel perbandingan data *unaudited* dengan *audited* meliputi : Target dan Realisasi PBNP, Pagu dan Realisasi Belanja, dan Neraca per 31 Desember 2013 disajikan sebagai berikut :

Tabel : 5
Ringkasan Estimasi dan Realisasi Pendapatan PNBPN TA 2013
Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited (*Netto*)

UNIT ES 1	ESTIMASI			REALISASI		
	Audited	Unaudited	Koreksi	Audited	Unaudited	Koreksi
Sekretariat Jenderal	5.083.716.000	5.083.716.000	0	8.562.984.216	8.555.064.216	7.920.000
Inspektorat Jenderal			0	136.446.832	136.446.832	0
Bina Gizi dan KIA	312.261.000	312.261.000	0	12.981.635.811	13.069.259.711	(87.623.900)
Bina Upaya Kesehatan	5.979.068.604.000	5.921.325.874.000	57.742.730.000	7.141.837.476.842	7.071.507.540.620	70.329.936.222
PP dan PL	51.666.676.948	51.666.676.948	0	134.867.081.001	134.861.684.915	5.396.086
Binfar dan Alkes	18.029.380.000	18.029.380.000	0	26.112.245.686	26.112.245.686	0
Litbang Kesehatan	1.160.621.250	1.314.731.250	(154.110.000)	7.135.042.191	8.008.075.617	(873.033.426)
PPSDM Kesehatan	516.462.327.030	516.462.327.030	0	508.655.817.580	505.731.947.926	2.923.869.654
Jumlah	6.571.783.586.228	6.514.194.966.228	57.588.620.000	7.840.288.730.159	7.767.982.265.523	72.306.464.636
Prosentase koreksi			0,88%			0,93%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa koreksi/penyesuaian atas estimasi PNBPN terdapat penambahan nilai sebesar Rp57.588.620.000 atau meningkat sebesar 0,88% yaitu pada Unit Eselon I Ditjen BUK bertambah sebesar Rp57.742.730.000, sedangkan pada Litbangkes berkurang sebesar (Rp154.110.000). Koreksi/penyesuaian atas realisasi PNBPN bertambah sebesar Rp72.306.464.636 atau 0,93% dengan rincian : Unit Eselon I yang mengalami penambahan Setjen sebesar Rp7.920.000, Ditjen Bina Upaya Kesehatan sebesar Rp70.329.936.222, Ditjen PP dan PL sebesar Rp5.396.086 dan Badan PPSDM sebesar Rp2.923.869.654. Sedangkan Unit Eselon I yang mengalami

pengurangan yaitu Ditjen Bina Gizi dan KIA sebesar (Rp87.623.900) dan Litbangkes sebesar (Rp873.033.426).

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013 hasil Koreksi/Penyesuaian Audited seperti pada tabel berikut :

Tabel : 6.

**Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2013
Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited (Netto)**

UNIT ESELON I	AUDITED		UNAUDITED		KOREKSI	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
Sekretariat Jenderal	3.354.088.501.000	3.122.648.250.081	3.354.014.106.000	3.121.892.541.906	74.395.000	755.708.175
Inspektorat Jenderal	96.084.865.000	75.830.756.798	96.084.865.000	75.831.236.798	0	-480.000
Bina Gizi dan KIA	2.135.828.808.000	1.981.177.561.084	2.135.694.677.000	1.975.271.150.522	134.131.000	5.906.410.562
Bina Upaya Kesehatan	25.274.163.541.000	23.282.368.414.014	25.246.131.746.000	23.194.477.198.181	28.031.795.000	87.891.215.833
PP dan PL	2.341.121.376.000	2.195.538.406.395	2.341.121.376.000	2.104.841.444.916	0	90.696.961.479
Binar dan Alkes	1.695.733.199.000	1.558.460.782.864	1.695.733.199.000	1.558.529.148.664	0	-68.365.800
Litbang Kesehatan	564.386.909.000	532.873.265.993	564.308.909.000	533.110.461.269	78.000.000	-237.195.276
PPSDM Kesehatan	3.175.331.393.000	2.611.584.835.388	3.173.409.601.000	2.608.495.245.396	1.921.792.000	3.089.589.992
TOTAL	38.636.738.592.000	35.360.482.272.617	38.606.498.479.000	35.172.448.427.652	30.240.113.000	188.033.844.965

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa koreksi/penyesuaian atas Pagu Anggaran Kemenkes bertambah sebesar Rp30.240.113.000. atau 0,08% sedangkan koreksi/penyesuaian atas realisasi Belanja bertambah sebesar Rp189.033.844.965 atau 0,53%. Secara prosentase, realisasi belanja meningkat dari 91,10% menjadi 91,52%.

Ringkasan Neraca Kemenkes per 31 Desember 2013 hasil koreksi/penyesuaian audit seperti pada tabel berikut.

Tabel : 7.

**Ringkasan Neraca per 31 Desember 2013
Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited**

Uraian	Neraca per 31 Desember 2013		
	Audited	Unaudited	Koreksi
Aset			
Aset Lancar	4.558.753.682.633	5.145.524.332.273	(586.770.649.640)
Aset Tetap	35.602.945.141.650	36.285.827.570.510	(682.882.428.860)
Piutang Jk. Panjang	504.974.320	504.974.320	0
Aset Lainnya	1.934.240.386.673	3.978.628.715.442	(2.044.388.328.769)
Jumlah Aset	42.096.444.185.276	45.410.485.592.545	(3.314.041.407.269)
Kewajiban			
Kewajiban Jk. Pendek	4.563.843.203.608	2.546.786.979.686	2.017.056.223.922
Ekuitas Dana			
Ekuitas Dana Lancar	(5.089.520.975)	2.598.737.352.587	(2.603.826.873.562)
Ekuitas Dana Investasi	37.537.690.502.643	40.264.961.260.272	(2.727.270.757.629)
Jumlah Ekuitas Dana	37.532.600.981.668	42.863.698.612.859	(5.331.097.631.191)
Kewajiban dan Ekuitas Dana	42.096.444.185.276	45.410.485.592.545	(3.314.041.407.269)
Prosentase Koreksi			-7,30%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa koreksi/penyesuaian atas Neraca Kemenkes per 31 Desember 2013, yaitu terdapat pengurangan aset sebesar (Rp3.314.041.407.269) atau (7,30%) dengan komposisi masing-masing : Aset Lancar berkurang sebesar (Rp586.770.649.640), aset Tetap berkurang sebesar (Rp682.882.428.860), Piutang Jangka Panjang tidak ada perubahan/koreksi, dan Aset Lainnya berkurang sebesar (Rp2.044.388.328.769).

Kewajiban bertambah sebesar Rp2.017.056.223.922, dan Ekuitas Dana berkurang sebesar (Rp5.331.097.631.191) dengan komposisi masing-masing : Ekuitas dana Lancar berkurang sebesar (Rp2.603.826.873.562) dan Ekuitas Dana Investasi berkurang sebesar (Rp2.727.270.757.629).

Informasi/catatan sesuai hasil pemeriksaan, antara lain :

1) Ditjen GiKIA,

Terdapat Belanja PHLN tahun 2012 sebesar \$ 50,072 atau Rp487.701.280 pada Direktorat Bina Gizi Masyarakat yang belum disahkan, hal ini disebabkan karena :

- a. Penerbitan SP3 (Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan) terhadap Withdrawal Application (WA) PT. Primex tidak dapat dilakukan oleh KPPN Khusus Jakarta VI pada Tahun Anggaran 2012 karena NoD (Notice of Disbursement) dari ADB baru terbit pada tanggal 9 Januari 2013.
- b. Direktorat Bina Gizi Masyarakat telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk merevisi DIPA Direktorat Bina Gizi Masyarakat TA. 2013 berupa penambahan pagu anggaran untuk mencantumkan anggaran PHLN NICE Project yang belum disahkan oleh KPPN Khusus Jakarta VI sebesar Rp487.701.280, namun sampai dengan 31 Desember 2013 belum juga bisa disahkan, karena belum ada ketentuan tentang tata cara revisi terkait dengan PHLN yang NODnya melebihi tahun anggaran. Ketentuan yang mengatur tentang tata cara revisi yang NODnya melewati tahun anggaran baru terbit di tahun 2014 sehingga proses pengesahan baru akan dilakukan di tahun 2014 ini.

2) Ditjen PP dan PL

Upaya pengamanan dan pemeliharaan aset flu burung yang telah dilakukan adalah dengan menganggarkan biaya listrik dan sewa gudang penyimpanan aset flu burung melalui DIPA Sekretariat Ditjen PP dan PL tahun 2013. Pada tahun 2013 telah dibayarkan listrik untuk kebutuhan gudang penyimpanan aset flu burung yang berlokasi di Cisarua senilai Rp1.230.424.200 dan di Pasteur senilai Rp308.640.000. Pada tahun 2013 Sekretariat Ditjen PP dan PL juga membayar sewa gudang penyimpanan aset flu burung yang berlokasi di Buah Batu senilai Rp593.208.000.

3) Badan Litbang Kesehatan

- a. Terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp13.670.989 merupakan pengembalian belanja lewat tahun pada Satker Balai Litbang P2B2 Tanah Bumbu, dan sudah disetor ke Kas negara pada tanggal 6 Januari 2014.
- b. Terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp23.212.578.867 merupakan tunjangan kinerja yang belum diberikan pada saat 31 Desember 2013 sebesar Rp19.097.218.000 dan sudah dibayarkan pada bulan Januari 2014 dan sebesar Rp4.115.360.867 merupakan sisa dana hibah langsung yang akan dilaksanakan tahun 2014.
- c. Terdapat Piutang Bukan Pajak sebesar Rp92.462.750 merupakan pengembalian tunjangan pegawai yang melakukan tugas belajar dan denda keterlambatan pekerjaan pemerintah, sudah dilakukan penyisihan piutang sesuai ketentuan.
- d. Terdapat Persediaan sebesar Rp8.833.450.377 yang antara lain berupa alat-alat dan bahan laboratorium untuk kegiatan penelitian di lingkungan wilayah satker Badan Litbang Kesehatan sudah melalui stock opname

4) Badan PPSDM Kesehatan

Terdapat pengadaan pusat/dropping ke daerah baik satker vertikal atau pemda tahun 2009 & 2010 yang belum diserahterimakan dengan nilai sebesar Rp781.726.702.600 yang ada pada satker Sekretariat Badan sudah dilakukan reklasifikasi menjadi aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sesuai dengan hasil tripartit antara Kemenkes, Kemenkeu dan BPK.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2013			31 DESEMBER 2012
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	REALISASI
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. Pendapatan PNB				
	423. Penerimaan PNB Lainnya	330.854.013.229	1.304.635.288.560	394,32%	883.860.327.533
	424. Pendapatan Badan Layanan Umum	6.240.929.572.999	6.535.653.441.599	104,72%	5.807.921.983.036
	2. Hibah	0	0		
	JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	6.571.783.586.228	7.840.288.730.159	119,30%	6.691.782.310.569
B	BELANJA NEGARA				
	1. Belanja Pegawai	5.428.821.338.000	5.094.448.435.494	93,84%	4.022.360.273.490
	2. Belanja Barang	16.290.725.264.000	14.789.155.514.923	90,78%	12.710.114.947.894
	3. Belanja Modal	8.807.427.130.000	7.371.607.598.107	83,70%	6.717.151.919.445
	4. Belanja Bantuan Sosial	8.109.764.860.000	8.105.270.724.093	99,94%	7.125.999.210.651
	JUMLAH BELANJA	38.636.738.592.000	35.360.482.272.617	91,52%	30.575.626.351.480

KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2013 DAN 2012

URAIAN	Catatan	31 Desember 2013	31 Desember 2012	KENAIKAN (PENURUNAN)
		Audited	Audited	
ASET				
ASET LANCAR	C.2.1			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1	3.186.710.112	6.262.507.732	(3.075.797.620)
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.1.2	2.356.175.466	623.004.566	1.733.170.900
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1.3	834.856.880.212	241.587.628.083	593.269.252.129
Kas pada BLU	C.2.1.4	1.318.153.443.734	1.237.850.673.943	80.302.769.791
Investasi jangka pendek BLU	C.2.1.5	70.105.000.000	28.653.752.745	41.451.247.255
Belanja dibayar di muka	C.2.1.6	14.034.904.313	14.233.629.570	(198.725.257)
Uang Muka Belanja	C.2.1.7	276.703.125.544	168.901.211.223	107.801.914.321
Piutang Bukan Pajak	C.2.1.8	45.313.629.168	132.537.177.149	(87.223.547.981)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.2.1.9	(344.183.953)	(53.368.242)	(290.815.711)
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	C.2.1.10	44.969.445.215	132.483.808.907	(87.514.363.692)
Bagian Lancar Tagihan TGR	C.2.1.11	48.300.000	44.375.000	3.925.000
Penyisihan Putang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TGR	C.2.1.12	(247.500)	(497.875)	250.375
<i>Bagian Lancar Tagihan TGR (Netto)</i>	C.2.1.13	48.052.500	43.877.125	4.175.375
Piutang Kegiatan Operasional BLU	C.2.1.14	879.978.571.229	689.346.027.709	190.632.543.520
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Operasional BLU	C.2.1.15	(242.421.384.287)	(244.824.736.341)	2.403.352.053
<i>Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)</i>	C.2.1.16	637.557.186.942	444.521.291.368	193.035.895.574
Piutang Kegiatan Non Operasional BLU	C.2.1.17	5.172.117.979	3.207.152.029	1.964.965.950
Penyisihan Piutang Kegiatan Non Operasional BLU	C.2.1.18	(522.540.005)	(571.415.481)	48.875.476
<i>Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)</i>	C.2.1.19	4.649.577.974	2.635.736.548	2.013.841.426
Persediaan	C.2.1.20	884.762.608.877	982.793.939.244	(98.031.330.367)
Persediaan BLU	C.2.1.21	467.370.571.744	414.626.580.637	52.743.991.107
JUMLAH ASET LANCAR		4.558.753.682.633	3.675.217.641.691	883.536.040.942
ASET TETAP	C.2.2			
Tanah	C.2.2.1	2.840.173.288.344	2.786.838.614.952	53.334.673.392
Tanah BLU	C.2.2.2	10.692.949.700.550	10.451.286.878.102	241.662.822.448
Peralatan dan Mesin	C.2.2.3	13.758.762.620.889	11.029.393.987.848	2.729.368.633.041
Peralatan dan Mesin BLU	C.2.2.4	7.370.638.441.681	6.406.981.172.209	963.657.269.472
Gedung dan Bangunan	C.2.2.5	4.199.037.545.782	3.405.341.806.215	793.695.739.567
Gedung dan Bangunan BLU	C.2.2.6	5.642.034.060.629	5.081.785.664.432	560.248.396.197
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.2.7	139.107.342.768	187.010.954.455	(47.903.611.687)
Jalan,Irigasi dan Jaringan BLU	C.2.2.8	339.626.428.097	310.810.229.722	28.816.198.375
Aset Tetap Lainnya	C.2.2.9	134.107.341.854	69.730.558.579	64.376.783.275
Aset Tetap Lainnya BLU	C.2.2.10	75.982.382.199	74.205.613.653	1.776.768.546
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2.2.11	1.676.184.755.988	1.974.244.996.993	(298.060.241.005)
Konstruksi dalam Pengerjaan BLU	C.2.2.12	1.046.116.382.651	900.682.271.965	145.434.110.686
Akumulasi Penyusutan	C.2.2.13	(12.311.775.149.782)	-	-
JUMLAH ASET TETAP		35.602.945.141.650	42.678.312.749.125	(7.075.367.607.475)
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.2.3			
Tagihan TP/TGR	C.2.3.1	564.330.625	576.602.260	(12.271.635)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.2.3.2	(67.092.430)	(76.450.750)	9.358.320
<i>Tagihan TP/TGR (Netto)</i>	C.2.3.3	497.238.195	500.151.510	(2.913.315)
Tagihan TP/TGR BLU	C.2.3.4	7.775.000	-	7.775.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR BLU	C.2.3.5	(38.875)	-	(38.875)
<i>Tagihan TP/TGR BLU (Netto)</i>	C.2.3.6	7.736.125	-	7.736.125
Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.2.3.7	15.245.500	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.2.3.8	(15.245.500)	-	-
<i>Piutang Jangka Panjang Lainnya (Netto)</i>	C.2.3.9	-	-	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		504.974.320	500.151.510	4.822.810
ASET LAINNYA	C.2.4			
Aset tidak berwujud	C.2.4.1	79.882.134.668	59.933.887.371	19.948.247.297
Aset tidak berwujud BLU	C.2.4.2	42.411.353.924	28.007.851.163	14.403.502.761
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	C.2.4.3	691.186.932.002	2.180.231.243.962	(1.489.044.311.960)
Aset Lain-lain	C.2.4.4	2.514.979.295.795	9.073.741.396.617	(6.558.762.100.822)
Aset Lain-lain BLU	C.2.4.5	77.814.274.970	66.109.501.512	11.704.773.458
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.2.4.6	(1.472.033.604.686)	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA		1.934.240.386.673	11.408.023.880.625	(9.473.783.493.952)
JUMLAH ASET		42.096.444.185.276	57.762.054.422.951	(15.665.610.237.675)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.2.5			
Utang kepada Pihak ketiga	C.2.5.1	4.451.060.960.415	1.004.941.840.981	3.446.119.119.434
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.5.2	56.280.204.888	24.893.173.943	31.387.030.945
Uang Muka dari KPPN	C.2.5.3	3.186.710.112	6.262.507.732	(3.075.797.620)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	C.2.5.4	53.296.994.236	34.431.314.908	18.865.679.328
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.5.5	18.333.957	78.814.543	(60.480.586)
JUMLAH KEWAJIBAN JK.PENDEK		4.563.843.203.608	1.070.607.652.107	3.493.235.551.501
JUMLAH KEWAJIBAN		4.563.843.203.608	1.070.607.652.107	3.493.235.551.501
EKUITAS DANA	C.2.6			
EKUITAS DANA LANCAR	C.2.6			
Cadangan Piutang	C.2.6.1	687.224.262.631	579.684.713.948	107.539.548.683
Cadangan Persediaan	C.2.6.2	1.352.133.180.621	1.397.420.519.881	(45.287.339.260)
DYHDU bayar hutang Jangka Pendek	C.2.6.3	(4.166.617.451.115)	(988.874.234.676)	(3.177.743.216.439)
Dana Lancar BLU	C.2.6.4	1.388.258.443.734	1.266.504.426.688	121.754.017.046
Ekuitas Dana Lancar Lainnya	C.2.6.5	499.454.218.185	191.524.140.268	307.930.077.917
Barang/Jasa Yang Harus Diterima	C.2.6.6	290.738.029.857	183.134.840.793	107.603.189.064
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan	C.2.6.7	(56.280.204.888)	(24.784.417.318)	(31.495.787.570)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		(5.089.520.975)	2.604.609.989.584	(2.609.699.510.558)
EKUITAS DANA INVESTASI	C.2.7			
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.7.1	35.602.945.141.650	42.678.312.749.125	(7.075.367.607.475)
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.7.2	1.934.745.360.993	11.408.524.032.135	(9.473.778.671.142)
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		37.537.690.502.643	54.086.836.781.260	(16.549.146.278.617)
JUMLAH EKUITAS DANA		37.532.600.981.668	56.691.446.770.844	(19.158.845.789.176)
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS DANA		42.096.444.185.276	57.762.054.422.951	(15.665.610.237.675)